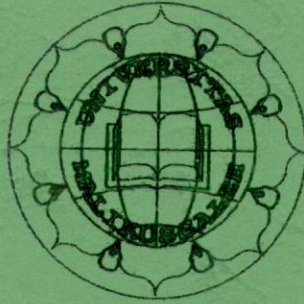


LAPORAN PENELITIAN



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK PAKAI SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK
TANGGUNGAN BESERTA BENDA-BENDA LAIN YANG ADA DI ATASNYA
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

OLEH

YULIA S.H M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH


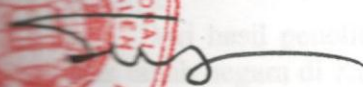
2010

Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian

1. a. Judul Penelitian : **Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pakai Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Lain Yang Ada di Atasnya di Kabupaten Aceh Utara**

- b. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
2. Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Yulia S.H M.H
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 197306132002122002
- d. Pangkat/ Golongan : Penata Muda / III a
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Fakultas/ Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
3. Alamat Ketua Peneliti:
- a. Alamat Kantor/Telp/Faks/Email : Jln. Tgk Chik Ditiro No. 26 Lancang Garam Lhokseumawe (0645) 41373 4450
- b. Alamat Rumah/Telp/Email : Krueng Mane, Aceh Utara/ liahumaira_af@yahoo.com
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Utara
5. Waktu Kegiatan : 6 (Enam) Bulan
6. Biaya : Mandiri


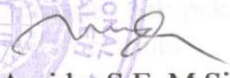
Menyetujui,
Ketua Fakultas Hukum



Yulia S.H., M.Hum
NIP 196605032001121001

Lhokseumawe, 10 Maret 2010
Peneliti


Yulia S.H., M.H
NIP 197306132002122002

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Apridar S.E., M.Si
NIP 196704132001121001

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK PAKAI SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK
TANGGUNGAN BERSERTA BENDA-BENDA LAIN YANG ADA DI
ATASNYA DI KABUPATEN ACEH UTARA**

Oleh : Yulia, S.H.,M.H

ABSTRAK

Hak pakai dalam UUPA tidak ditunjukkan sebagai objek hak tanggungan, karena tidak termasuk dalam hak yang wajib didaftarkan dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat publisitas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Dalam perkembangannya hak pakai harus didaftarkan yaitu hak pakai atas tanah negara. Dalam ketentuan UUHT, terhadap hak pakai atas tanah negara walaupun wajib didaftarkan akan tetapi ada hak pakai yang tidak dapat dipindahtanggankan dan bukan objek hak tanggungan. Hak pakai yang demikian adalah hak pakai atas nama pemerintah, hak pakai atas nama badan keagamaan dan sosial dan hak pakai atas nama perwakilan negara asing.

Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis yuridis normatif, yaitu metode yang berpegang pada segi-segi yuridis. Hal ini dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan pendaftaran hak pakai atas tanah negara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berserta benda-benda lain yang ada di atasnya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pendaftaran hak pakai atas tanah atas tanah negara di Kabupaten Aceh Utara, pendaftaran hak pakai atas tanah Negara telah dilakukan dan telah mempunyai sertifikat sejumlah 122 hak pakai atas tanah Negara yang tersebar di 26 kecamatan baik yang mempunyai alas hak asli ataupun tidak ada alas hak asli. Terhadap hak pakai atas tanah negara tersebut tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan karena hak pakai atas tanah negara tersebut diberikan untuk departemen dan non departemen termasuk lembaga sosial, sedangkan hak pakai yang dapat dibebankan dengan hak tanggungan adalah hak pakai yang diberikan untuk perseorangan dan badan-badan perdata. Disarankan kepada pemerintah dalam hal ini adalah instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara untuk secepatnya dan semaksimal mungkin untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pendaftaran hak pakai atas tanah negara yang di berikan untuk perseorangan dan badan-badan perdata.